

PENGELOLAAN PROGRAM KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN DI JALUR PANTURA PEKALONGAN

DIO SATRIO JATI

ABSTRACT

Transportation problems on roads with high density traffic, such as Jalur Pantura, are usually characterized with high numbers of accidents. Road safety problems might even be categorized as cultural matters due to its wide implications upon our daily lives. The implementation of road transportation safety program has become a complex issue for it is not only related to technical challenges but also institutional, budgetary, government and societal supports which are closely connected to each other. Every region faces problems with unique characteristics, therefore the way of road transportation safety program is implemented differs according to the complexities of existing problems. This research findings show that the implementation of traffic safety management program within the Regency and City of Pekalongan administrative area has been fairly effective. The conclusion is drawn upon how much the citizens regard the program as beneficial to them and how much the benefits of the program implementation are felt. Although it is impossible to reduce the number of traffic accidents to zero, this study proves the government's efforts to address the traffic safety issue on Pantura Route to be fairly successful.

Keywords : Evaluation, Transportation Safety, Public Management

A. PENDAHULUAN

Keselamatan adalah kata mutlak untuk manusia dari segala kegiatan yang dilakukan termasuk keselamatan transportasi. Sebagian kota Indonesia angka kecelakaan termasuk tinggi, baik itu di kota kecil dan apalagi kota-kota besar. Pembangunan sistem transportasi yang belum terarah merupakan titik lemah dari pokok masalah utama tentang pembangunan sistem transportasi. Memang bila kita tengok lebih ke belakang adalah hal yang tidaklah mudah dalam mengatur model sistem transportasi di negeri kepulauan dengan aksesibilitas yang kompleks di setiap daerah.

Semakin maju perkembangan zaman membuat transportasi di Indonesia menjadi lebih kompleks dan lebih rumit, dalam perjalanannya perkembangan sistem transportasi darat tidak mencerminkan adanya kemajuan akses mayoritas penduduk terhadap pembangunan yang ada, yang terjadi sebaliknya adalah dimana perkembangan sistem transportasi jalan darat justru membatasi dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat melihat yang terjadi adalah kurangnya sistem teknologi komunikasi yang memadai guna mengutamakan keselamatan para pengguna jalan darat. Hal ini terbukti dengan banyaknya korban kecelakaan jalan darat yang semakin bertambah tiap tahun bahkan kebanyakan dari korban yang ada adalah korban yang berusia produktif.

Tabel 1.1
Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerugian Materi yang Diderita Tahun 2000-2010

Tahun	Jumlah Kecelakaan	Korban Mati	Luka Berat	Luka Ringan	Kerugian Materi (Juta Rp)
2000	12.649	9.536	7.100	9.518	36.281

2001	12.791	9.522	6.656	9.181	37.617
2002	12.267	8.762	6.012	8.929	41.030
2003	13.399	9.856	6.142	8.694	45.778
2004	17.732	11.204	8.983	12.084	53.044
2005	91.623	16.115	35.891	51.317	51.556
2006	87.020	15.762	33.282	52.310	81.848
2007	49.553	16.955	20.181	46.827	103.289
2008	59.164	20.188	23.440	55.731	131.207
2009	62.960	19.979	23.469	62.936	136.285
2010	66.488	19.873	26.196	63.809	158.259

Sumber : Kantor Kepolisian Republik Indonesia

(http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=17¬ab=14)

(diakses pada 10 Oktober 2012 Pukul 15.34)

Data di atas sangat mencerminkan bahwa kecelakaan transportasi jalan darat sangat merugikan negara, karena berdasarkan riset dari berbagai sumber kebanyakan korban berusia produktif, dengan semakin bertambahnya korban usia produktif maka roda perekonomian negara tentu akan terus tergerus hingga pada akhirnya bukan hanya membahayakan kehidupan tiap pribadi namun juga membahayakan mobilitas dan laju perekonomian bangsa Indonesia.

Pada dasarnya program keselamatan transportasi jalan mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, dimana di dalamnya memuat acuan penting dalam pelaksanaan program keselamatan transportasi jalan, penyelenggaraan program keselamatan transportasi jalan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan Masyarakat. Dalam kaitannya di Jalur Pantura Pekalongan pelaksanaan program keselamatan transportasi jalan di jalankan oleh pemerintah pusat sebagai pelaksana dan pemerintah daerah sebagai pembantu terlaksananya program keselamatan transportasi jalan. Secara keseluruhan program keselamatan transportasi jalan meliputi bidang jalan dan bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Bidang-bidang dalam program keselamatan transportasi jalan sejatinya mencakup hal-hal yang sangat erat kaitannya dengan keselamatan transportasi jalan seperti diantaranya dalam bidang jalan memuat program: (1) inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya (2) penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan (3) perencanaan, pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan (4) perbaikan geometrik luas jalan dan persimpangan jalan (5) penetapan ruas jalan pada setiap ruas jalan (6) uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan kenyamanan berlalulintas (7) pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.

Bidang lainnya yang memuat sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi program: (1) bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (2) manajemen dan rekayasa lalu lintas (3) teknik dan laik jalan kendaraan bermotor (4) perizinan angkutan umum (5) pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (6) pembinaan

SDM dalam bidang sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (7) penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan serta yang terakhir adalah program pendidikan keselamatan transportasi dan lalu lintas

Secara umum program keselamatan transportasi jalan yang dilakukan di Jalur Pantura mengacu pada Program Keselamatan Transportasi Jalan sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009. Tentunya program dan rencana aksi keselamatan transportasi jalan mengadopsi pandangan yang lebih luas pada tindakan pencegahan korban lalu lintas yang membutuhkan perhatian khusus seperti keselamatan pengguna jalan termasuk perbaikan angkutan umum dan ruang jalan bagi pejalan kaki dan pesepeda serta pengguna jalan lainnya. Bentuknya pun bisa berupa standarisasi helm yang berstandar Nasional Indonesia (SNI), standarisasi kelas jalan, standarisasi angkutan umum, standarisasi rambu-rambu lalu lintas, penggunaan lampu pada siang hari untuk kendaraan roda dua, penggunaan sabuk pengaman untuk kendaraan roda empat atau lebih, standarisasi kelaikan angkutan pribadi dan angkutan umum termasuk standarisasi ukuran kendaraan bermotor sesuai kelas jalan dan lainnya yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Program keselamatan transportasi jalan pun bentuknya bermacam-macam kegiatan, sejak tahun 2007 telah dilaksanakan "Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan" dan Pada tahun 2008 dilaksanakan pula "Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan II" dengan tema "keselamatan tanggung jawab kita semua". Setelah tahun 2011 dilaksanakan pula kegiatan rutin yang bertajuk "Dekade Aksi Keselamatan Jalan Indonesia 2011-2020" yang pada tahun 2012 khusus di Jawa Tengah dan sepuluh provinsi terpilih menjalankan program pemerintah pusat tersebut bertajuk "Pekan Aksi Keselamatan Jalan Indonesia 2012" dimana program ini diselenggarakan pada 10 provinsi antara lain Sumatra Utara, Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Maluku dan Papua.

Permasalahan yang kemudian menarik untuk dibahas adalah bagaimana evaluasi pengelolaan program keselamatan transportasi jalan berjalan di Jalur Pantura Pekalongan, saat peraturan sudah dianggap baik untuk diimplementasikan namun jumlah korban kecelakaan masih saja terus bertambah. Evaluasi yang dimaksud disini adalah bagaimana perjalanan pelaksanaan program keselamatan transportasi jalan, kendala dan solusi untuk masalah keselamatan transportasi jalan di Jalur Pantura Pekalongan.

Penelitian tentang evaluasi pengelolaan program keselamatan transportasi jalan di Jalur Pantura memiliki tujuan antara lain: (1) memetakan pengelolaan program keselamatan transportasi jalan di Jalur Pantura (2) melakukan analisis terhadap peran pemerintah, ataupun lembaga-lembaga diluar pemerintah yang dapat mendukung terlaksananya program keselamatan transportasi jalan di Jalur Pantura Pekalongan dan (3) melakukan evaluasi pengelolaan program keselamatan transportasi jalan di Jalur Pantura Pekalongan.

Teori yang dipakai untuk mengupas tuntas permasalahan pengelolaan keselamatan transportasi jalan di Jalur Pantura Pekalongan adalah teori evaluasi yang dicetuskan oleh William Dunn (1999) dimana evaluasi adalah suatu proses yang membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan yang benar-benar dihasilkan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik

terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

Kriteria Evaluasi menurut Dunn meliputi : Pertama, efektifitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter. Kedua, efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Ketiga, kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Keempat, William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kelima, responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu dan terakhir adalah ketepatan yakni menurut William N. Dunn berkenaan dengan Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan dibantu sedikit pendekatan kuantitatif sebagai bahan perbandingan. Penulis lebih menitikberatkan pada penelitian evaluasi formatif dimana dalam pengelolaan program keselamatan transportasi jalan di Jalur Pantura Pekalongan merupakan suatu program dari pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan yang sedang berjalan dan banyak indikasi bahwa program-program ini dirasa perlu untuk diberi umpan balik untuk diperbaiki. Terkait dengan responden, maka responden penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berada di Jalur Pantura Pekalongan (Kota dan Kabupaten Pekalongan) dan subjek penelitian adalah masyarakat disepanjang Jalur Pantura Pekalongan.

Penelitian ini berfokus pada penelitian kualitatif maka penulis mendapatkan informasi. Penulis menggunakan teknik bola salju (*SnowBall*). Menurut Sugiyono, *Snow Ball* adalah teknik pengambilan sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang dapat digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2005).

Selanjutnya teknik pengumpulan data penulis melakukan wawancara mendalam, wawancara terstruktur, observasi dan menggunakan data sekunder. Terakhir dari metoda penelitian, ada tiga teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini. *Pertama*, teknik deskriptif analitis. Teknik ini artinya adalah selain penelitian ini mendeskripsikan tentang permasalahan yang diangkat, juga melakukan analisa untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana masalah itu terjadi. *Kedua*, penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus (*case study*). Artinya, penelitian ini mengambil satu kasus untuk diteliti secara mendalam sesuai permasalahan yang sudah dirumuskan. *Ketiga*, penelitian ini juga menggunakan pendekatan melalui prosedur reduksi, penyajian data, dan verifikasi data. Selain itu

penulis juga melakukan teknik triangulasi data untuk keakuratan data yang diperoleh.

B. PEMBAHASAN

Kecelakaan Transportasi jalan darat mempunyai resiko yang besar, bahkan bisa melebihi korban perang, korban dari kecelakaan ini tak seharusnya terjadi mengingat semakin berjalannya waktu perkembangan sistem transportasi jalan darat semakin diarahkan kejalan perkembangan yang modern. Memang secara nasional Indonesia belum memiliki angka pasti berapa korban yang jatuh akibat kecelakaan namun Indonesia saat ini masih merujuk pada data kepolisian sebagai acuan yang paling realistis guna menghitung angka kecelakaan akibat transportasi jalan darat secara nasional.

Pemaparan di atas menegaskan bahwa program keselamatan transportasi jalan di Jalur Pantura Pekalongan memang masih membutuhkan suatu evaluasi untuk diberikan umpan balik agar penerapannya bisa lebih baik dimasa mendatang. Dalam penelitian ini kriteria evaluasi Dunn menjadi salah satu mata pisau untuk membedah permasalahan keselamatan transportasi jalan di Jalur Pantura Pekalongan. Kriteria tersebut meliputi :

a. Efektivitas

Merupakan suatu hasil dari sebuah pekerjaan atau program yang dilakukan secara baik dan benar, menurut tata cara yang sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya tanpa ada inefisiensi waktu, tenaga dan pikiran. Kaitannya dengan evaluasi program keselamatan transportasi jalan di Jalur Pantura adalah segala upaya yang telah dilakukan pemerintah terkait dengan pelaksanaan program keselamatan transportasi jalan di Jalur Pantura.

Penerapan program keselamatan transportasi jalan dinilai telah mempunyai tujuan-tujuan yang besar dan bisa dipastikan mempunyai efektivitas yang besar pula terkait hasil yang akan dicapai pada tujuan tersebut. Secara keseluruhan penerapan program keselamatan transportasi jalan di Jalur Pantura sudah sesuai dengan tujuan yang ditentukan sebelumnya namun untuk hasil dan dampak dari tujuan tersebut belum bisa mengurangi kecelakaan secara signifikan, di lain pihak penerapan program ini bisa memberikan kelancaran arus barang dan jasa dan mendukung penerapan program satu dengan lainnya sehingga program ini dipandang telah mencapai sebagian tujuan yang ditentukan di awal.

Pelaksanaannya Pengelolaan program keselamatan transportasi jalan di jalur Pantura Pekalongan penerapannya sesuai dengan keadaan yang tengah berkembang di lingkungan masyarakat dan dengan pelaksanaan program ini telah membantu pemerintah untuk memahami akan pentingnya keselamatan transportasi jalan. Meski belum bisa berjalan dengan baik dan mengurangi jumlah korban kecelakaan namun secara keseluruhan penerapan program keselamatan transportasi jalan di Jalur Pantura Pekalongan berjalan cukup efektif dan tidak bisa dianggap gagal karena sebagian besar hasil dan dampak yang diharapkan masyarakat sudah tercapai.

b. Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Pelaksanaan program keselamatan transportasi jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota Pekalongan sama-sama mengklaim bahwa mereka melakukan efisiensi anggaran dengan sebaik-baiknya karena memang anggaran APBD sudah terencana dengan baik, selain itu terkadang masalah dana yang dirasa kurang untuk melakukan sosialisasi keselamatan program keselamatan transportasi jalan pemda daerah yang bersangkutan mengajukan tambahan dana kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui mekanisme yang ada, mekanisme dan prosedur bersifat sebagai rambu-rambu semata dalam penerapannya proses negosiasi lah yang menjadi penentu turunnya anggaran dari pusat ke daerah. Pemerintah Pusat biasanya melihat keseriusan dari daerah yang dicek dilapangan sedang pemerintah daerah biasanya memberikan penjelasan dan berupaya untuk membenahi sistem transportasi di Jalur Pantura untuk kelanjutan program keselamatan transportasi jalan kedepannya.

c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Pelaksanaan program keselamatan transportasi jalan bukan tidak berbenturan dengan berbagai kepentingan yang ada baik itu terkait dengan pelaksanaan program itu sendiri atau terkait dengan program yang lain. Terkait dengan permasalahan transportasi untuk menghindari benturan atau gesekan kepentingan biasanya pemerintah daerah melakukan rapat yang bertajuk "Forum Lalu-lintas dan Angkutan Jalan" dimana disekitar Jalur Pantura Pekalongan biasa diikuti oleh kepolisian, dishub, dinsos, dinkes dan kumpulan para pengusaha angkutan jalan. Disitu digodok bagaimana pelaksanaan program keselamatan transportasi jalan, ada proses negosiasi dan saling memberikan solusi untuk terlaksananya program. Proses pengambilan keputusan biasanya secara (*deliberative*) sehingga bisa terdapat kerja sama yang baik antar berbagai pihak yang berkepentingan.

Pengelolaan program keselamatan transportasi jalan di Jalur Pantura dinilai cukup baik, melihat kerja sama dari berbagai pihak untuk bisa bersinergi baik secara instansi maupun program yang ada. Peran instansi terkait dalam pengelolaan program keselamatan transportasi jalan di Jalur Pantura Pekalongan telah berjalan dengan baik. Sejauh ini kerja sama tidak hanya ada pada skala mikro namun juga makro guna memberikan kesempatan untuk berkontribusi aktif dalam mengembangkan pengelolaan program keselamatan transportasi jalan di Jalur Pantura Pekalongan.

d. Perataan

William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Dalam indikator ini para pelaku atau para pengguna program terlihat setuju bahwa program keselamatan transportasi jalan di Jalur Pantura ini telah secara adil dilaksanakan tanpa merugikan pihak lain. Seperti pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas yang dibangun oleh Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan dimana dalam proses perencanaan, implementasi dan dampak telah melibatkan berbagai element

yang terkait langsung maupun tidak langsung, yakni pengguna jalan, pengusaha angkutan umum bahkan sektor parkir telah ditata agar pelaksanaan program keselamatan transportasi jalan di Jalur Pantura bisa berjalan dengan baik. Namun memang hal ini tetap menjadi kendala utama terutama perilaku masyarakat terkait dengan keselamatan transportasi yang kurang bisa di prediksi.

Program keselamatan transportasi jalan yang diimplementasikan di Jalur Pantura Pekalongan dianggap telah memenuhi pemerataan yang ada karena masyarakat dan pemerintah menganggap kebijakan tersebut mempunyai tujuan yang jelas yaitu memperkecil angka kecelakaan di Jalur Pantura Pekalongan mengingat padatnya lalu lintas di Jalur Pantura Pekalongan terutama pada saat jam sibuk dan menjelang perayaan hari besar lainnya.

e. Responsivitas

Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Tidak diperlukannya program pengganti disebabkan oleh tidak adanya kerugian yang besar dari penerapan program ini, penerapan kebijakan hingga tingkat desa sudah mumpuni dan bisa dikatakan sesuai dengan kultur yang ada namun tetap yang menjadi perhatian adalah partisipasi SDM pengguna jalan mau tidak mereka menerapkan program keselamatan transportasi jalan, dan tentunya program keselamatan transportasi jalan bisa di kembangkan kearah yang lebih baik.

f. Ketepatan

Ketepatan menurut William N. Dunn berkenaan dengan Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Selama pelaksanaannya instansi terkait saling bekerja sama baik lingkup mikro maupun makro dimana disini Kementerian Perhubungan berperan dalam perencanaan, selama pelaksanaan dilimpahkan pada Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan dibantu dengan instansi terkait baik dalam lingkup daerah maupun lintas daerah instansi sedangkan dalam pengawasannya masyarakat sebagai pengguna layanan dipantau oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu sendiri.

Pengelolaan program keselamatan transportasi jalan di Jalur Pantura Pekalongan perlu mendapat perhatian dan dipertahankan untuk kedepannya karena program ini dibutuhkan oleh masyarakat dan pengelolaan program ini juga dianggap bisa menjawab tantangan era globalisasi meskipun tidak benar-benar bisa menghilangkan angka kecelakaan sama sekali.

Program ini juga mendukung adanya pelaksanaan program lainnya yang saling terkait untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Program keselamatan ini merupakan program yang saling melengkapi dan mendorong berjalannya program lainnya di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan.

C. PENUTUP

Hasil pemetaan berdasarkan indikator yang dibangun adalah sebagai berikut, Kebijakan pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan untuk

menerapkan pengelolaan program keselamatan transportasi jalan di Jalur Pantura Pekalongan merupakan pilihan yang bagus untuk mendukung peningkatan keselamatan transportasi jalan dan untuk mensejahterakan masyarakat. Sejauh ini setelah berjalannya pengelolaan program ini masyarakat mendapatkan manfaat seperti kelancaran dan kenyamanan saat berada di jalan, selain itu pengelolaan program ini bisa menjadikan pembelajaran untuk masyarakat agar daerah Pantura Pekalongan bisa terus berkembang dengan adanya kelancaran distribusi arus barang dan jasa.

Program ini juga mendorong adanya sinergi antara program satu dengan program lainnya yang sama-sama bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya selain itu tidak adanya tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Hal ini didasari oleh baiknya kerjasama antar instansi yang terkait untuk mensukseskan program hingga ke daerah-daerah.

Hasil penelitian yang berdasarkan indikator yang dibangun dalam teori terdapat beberapa kendala terutama menyangkut sumberdaya manusia dan sosialisasi dalam melaksanakan program keselamatan transportasi jalan. Kendala SDM secepatnya harus diberikan perhatian bahkan pelatihan juga sosialisasi kepada masyarakat yang belum mengetahui akan pentingnya keselamatan transportasi jalan, selain itu memberikan fasilitas yang menarik agar masyarakat antusias untuk mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah.

Bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan program keselamatan transportasi jalan di Jalur Pantura Pekalongan telah mencapai tujuan, meskipun angka kecelakaan di wilayah Jalur Pantura Pekalongan tidak bisa ditekan hingga 0% atau hilang sama sekali.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Pancur Siwah. Jakarta
- Alsa, A. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasi dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Baratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia. Bandung
- Darmawi, Herman. 2004. *Manajemen Resiko*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Dunn, William N. 1999. *Pengantar Analisis kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. LkiS. Yogyakarta
- Erna Widodo dan Mochtar. 2000. *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*. Avyrous . Jakarta
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen* . BPF, Yogyakarta
- Iriani, Enni (et.al.). 2007. *Kajian Kebijakan Good Local Governance dalam Optimalisasi Pelayanan Publik: Suatu Evaluasi Implementasi Pelayanan Terpadu di Kabupaten/ Kota di Indonesia*. PKP2A I-LAN. Bandung.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. PEMBARUAN. Yogyakarta
- Labolo, Muhadam. 2008. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. : PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Lijan Poltak Sinambela dkk. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi cetakan ketiga*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Marzuki, Didi (editor). 2006. *Bekerja Demi Rakyat: Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dalam Kebijakan dan Pelayanan Publik*. KomunaL. Jakarta
- Moeljarto. 1987. *Politik Pembangunan ; sebuah analisis konsep, arah dan strategi*. PT Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Moleong, L.J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Remaja Kosada Karya. Bandung

- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy : Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik : Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Salim, Abbas. 2004. *Manajemen Transportasi*. SMTI. Jakarta
- Siagian, Sondang P. 2005. *Manajemen Strategik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Straus, Ansem dan Uliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sugiyono, 2009, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-6, Penerbit ALFABETA, Bandung
- Suryadinata, Ermaya .1997. *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan : pendekatan budaya, moral dan etika*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2002. *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta
- Usman, Prof. Husaini dan Purnomo Setiyadi Akbar, 2008 *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi Kedua. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Widya Wicaksono, Kristian. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Graha Ilmu. Yogyakarta

Sumber Peraturan :

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Jalan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jurnal dan Modul:

Darmaningtyas dan Siti Aminah. Kebijakan Transportasi Untuk Semua Warga. *Jurnal Dialog Kebijakan Publik : Menyoal Aspek Transportasi dalam Kebijakan Publik Nasional*. (2007) hlm. 15-28. Penerbit Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Dikun, Suyono. Perspektif Ekonomi Politik dari Pembangunan Transportasi Indonesia. *Jurnal Dialog Kebijakan Publik : Menyoal Aspek Transportasi dalam Kebijakan Publik Nasional*. (2007) hlm. 7-14. Penerbit Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Taufik, Ahmad. *Modul Penelitian Sosial*, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP. Semarang. Tidak diterbitkan

Website :

Definisi Manajemen. 24 November 2011. <http://tkampus.blogspot.com/2011/11/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html> (Diakses pada 8 Oktober 2012 Pukul 17.16)

<http://definisi-pengertian.blogspot.com/> (diakses pada 21 September 2012 Pukul 21.37)

<http://publikasi.ums.ac.id/index.php/sipil/article/view/3617/2985> (diakses pada 24 september 2012 pukul 00.34)

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=17¬ab=14 (diakses pada 10 Oktober 2012 Pukul 15.34)

<http://www.metrotvnews.com/mobile-site/ramadhan/newsvideo/2012/08/18/15760/enam-hari-340-jiwa-melayang-dalam-kecelakaan-mudik/3> (diakses pada 21 September 2012 Pukul 21.10)

Ratih Prahesti Sudarsono. *Sudah 340 Orang Tewas Jelang Lebaran*. Sabtu 18 Agustus 2012. Nasional.kompas.com (diakses pada 21 September 2012 Pukul 21.10)

<http://www.pekalongankab.go.id>

Maria Yuniar. *Selama Mudik, 460 Jiwa Melayang*. Minggu 19 Agustus 2012. m.tempo.co (diakses pada 21 September 2012 Pukul 21.10)

Menentukan Instrument Penelitian. Senin 28 Desember 2009 <http://blogkatte.blogspot.com/2009/12/menentukan-instrumen-penelitian.html> Diakses pada 21 September 2012 Pukul 23.49

Nala Edwin. *Korban Meninggal Arus Mudik Sudah Mencapai 820 Jiwa*. 25 Agustus 2012. m.detik.com (diakses pada 21 September 2012 Pukul 21.00)

Putra. *Definisi Manajemen Menurut Para Ahli*. 21 November 2008. <http://putracentr.net/2008/11/21/definisi-manajemen-menurut-para-ahli/> Diakses pada 8 Oktober 2012 Pukul 12.16

Wahyudin, Fahmi. *Data Kecelakaan Nasional Merujuk Data Polisi* Tempointeraktif. Jakarta. 24 Juni 2009. (diakses pada 21 September 2012 Pukul 21.10)

www.damandiri.or.id diakses pada 2 Juni 2010 pukul 14.38 WIB

www.karyabangun-cv.com/index.php/berita-dan-artikel?start=4 diakses pada 8 Oktober 2012 Pukul 12.16

YVML Bikers Ride Safely Bro. *Pembunuh Utama Kaum Muda*. Koran Sindo. Minggu, 22/07/2007.. Diakses pada 8 Oktober 2012 Pukul 12.16